



Analisis Peran Pemadam Kebakaran Dalam Manajemen Bencana Di Kota Padang Tahun 2025

Auliana Putri^{1*}, Gusni Rahma², Meyi Yanti³

¹ Kesehatan Masyarakat, Universitas Alifiah Padang

² Kesehatan Masyarakat, Universitas Alifiah Padang

^{1*} uliana@gmail.com, ² gusni@gmail.com, ³ meiyanti@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Planton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.

Kata Kunci : Kebakaran, manajemen bencana, pemadam kebakaran.

Abstract

Based on data from the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Padang City, there were 198 fire incidents recorded in 2023, which increased to 245 cases in 2024. Fire Department (Damkar) personnel play a vital role in fire disaster management, including prevention, mitigation, and victim rescue. This study aims to analyze the role of the Padang City Fire Department in fire disaster management in 2025, covering input aspects (personnel, facilities and infrastructure, funding, and policy), processes (pre- disaster, during-disaster, and post-disaster), and the resulting outputs. This research uses a qualitative method with a phenomenological design, conducted from March to August 2025. Data collection was carried out through in-depth interviews with six informants: the Head of the Firefighting Division, the Supervision Section Head, the Prevention Section Head, the Operational Section Head, the Facilities and Infrastructure Section Head, and a Platoon Commander. The data collection was supported by field observations and document reviews. Data analysis was conducted using source and technique triangulation. The results of the study indicate that fire management implementation by the Padang City Fire Department has been fairly effective, and inter-agency coordination has been running optimally. The policies applied are in accordance with the standard operating procedures (SOP). However, some equipment needs are unmet, with many tools deemed unfit for use and spare parts difficult to find. Available funding is often limited and insufficient to meet all operational needs. Disaster response is carried out in a structured manner. Nevertheless, there are obstacles, including limited rescue vehicles and equipment, narrow road access, and a lack of community participation. The role of the fire department is considered fairly effective in carrying out its duties, despite constraints such as limited rescue fleets and equipment, narrow road access, and low community involvement. It is recommended that fire department personnel improve discipline and readiness at every stage of disaster management.

Keywords: Fire, disaster management, fire department.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, seringkali dan tidak terduga, yaitu diantaranya bencana alam seperti, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan, serta bencana non alam yang diakibatkan oleh tindakan manusia, baik karena kelalaian maupun karena perbuatan. Bencana non alam yang sering terjadi akibat kelalaian manusia dan dapat merusak serta merugikan adalah kebakaran *Good Stats* (BNPB 2024).

Masalah kebakaran merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang luas. Pada tahun 2024 terjadi sebanyak 935 kebakaran di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan banyak kerugian materil. Sebagian besar (75,29%) kebakaran menghancurkan rumah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023, dimana terjadi 864 kejadian kebakaran di seluruh wilayah Indonesia. Kota Padang mengalami peningkatan kasus kebakaran pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, dengan 245 kasus di tahun 2024 dan 198 kasus tahun 2023 (BPBD Kota Padang, 2024). Berbagai langkah dan upaya penanggulangan bahaya kebakaran merupakan hal yang penting yang perlu diterapkan dan dilaksanakan guna mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Upaya pencegahan bahaya kebakaran haruslah menjadi program dalam kebijaksanaan manajemen perusahaan dan juga harus didukung oleh segenap pekerja yang ada dalam semua perusahaan baik swasta maupun negeri Kementerian PUPR (2020).

Salah satu yang bertugas dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang mengurus kasus penyelamatan khususnya kebakaran. Tugas pokok yang dimiliki Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), antara lain mencegah terjadinya kebakaran, pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban yang disebabkan oleh kebakaran bahkan bencana yang lainnya. Dalam penanganan kebakaran permukiman petugas pemadam kebakaran sebelumnya harus sudah dilatih khusus oleh Dinas Pemadam Kebakaran agar mengurangi risiko fatal saat penugasannya (Pemkab Tapanuli Tengah, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2022, peraturan ini mengatur tentang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemadam dan penyelamatan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2022). Unit Damkar dilengkapi dengan armada mobil pemadam, perlengkapan pelindung, alat pemadam api, dan alat penyelamat. Pos pemadam ditempatkan strategis di berbagai titik kota/kabupaten untuk mempercepat respon, mereka menerapkan Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD). Penanganan Pasca- Bencana dapat melakukan membersihkan lokasi bekas kebakaran, membantu evakuasi korban dan penyelamat harta benda, memberikan laporan kepada BPBD untuk tindak lanjut penanganan sosial dan pembangunan ulang (Anggun et al., 2020).

Penelitian Nugraha, S (2019) Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif dan Pasif pada Gedung di Jakarta menyebutkan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan manajemen bencana sesuai Perencanaan (*Planning*) terdapat kendala kurangnya rencana kontinjensi. Banyak daerah belum memiliki rencana darurat kebakaran yang jelas dan terlatih, minimnya data dan pemetaan risiko tanpa data resiko kebakaran, perencanaan jadi reaktif, bukan preventif. Evaluasi berkala risiko dan perencanaan darurat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk perencanaan lintas sektor. Pengorganisasian (*Orfanizing*) kendala yang di hadapinya distribusi personel tidak merata: banyak daerah terpencil kekurangan tenaga pemadam, struktur organisasi tidak efisien, koordinasi antar unit bisa lambat dalam kondisi darurat, penataan ulang struktur organisasi agar lebih adaptif dan responsif. Penggerakan (*Actuating/Leading*) kendalanya motivasi dan kesejahteraan rendah. Upah kecil, jam kerja ekstrem, dan resiko tinggi berdampak pada semangat kerja. Pengendalian (*Controlling*) kendala nya evaluasi pasca-kebakaran jarang dilakukan tanpa evaluasi, kesalahan yang sama bisa terulang sistem pelaporan manual dan lambat, tidak semua kejadian tercatat dengan baik untuk analisis masa depan (Nugraha, S. 2019).

Berdasarkan penelitian Anggun et al., (2020) menyebutkan bahwa kendala utama yang sering di hadapi oleh Pemadam Kebakaran yaitu akses ke lokasi kebakaran yang jalannya sempit atau macet membuat mobil pemadam sulit mencapai lokasi, bangunan yang sulit dijangkau seperti gedung tinggi/area perbukitan atau pegunungan. Keterbatasan air yang jauh atau tidak tersedia didekat lokasi kebakaran, cuaca ekstrem angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Keterbatasan Peralatan Tidak semua daerah memiliki peralatan modern atau lengkap serta Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, Resiko terpaparnya zat berbahaya, kebakaran dapat melibatkan bahan kimia beracun atau gas berbahaya. Kurangnya personil serta petugas yang terbatas bisa menyulitkan penanganan kebakaran besar. Kurangnya kesadaran masyarakat tidak memahami pentingnya jalur evakuasi atau prosedur darurat. Tugas ganda selain memadamkan api, mereka juga sering harus menyelamatkan korban, hewan, hingga menangani bencana lain seperti banjir dan gempa (Anggun et al., 2020).

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan pada 11 Maret 2025 dengan mewawancarai Komandan Plenton (Danton) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, mengatakan bahwa Pada tahun 2023 program Manajemen Bencana telah dilaksanakan lebih tepat saat PJ jadi Walikota (Sekda), penanggung jawab dari Program Manajemen Bencana di Pemadam kebakaran Kota Padang Andre Aldamar. Manajemen Bencana tersebut dilaksanakan untuk mencegah terjadinya bencana yang ada di Kota Padang (Antisipasi Bencana), dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, gedung tinggi (Apartemen), puskesmas, kantor camat. Salah satu kegiatan sosialisasi tentang Pemadam Kebakaran yaitu Balakar (Barisan relawan kebakaran) tujuannya untuk mengurangi kejadian kebakaran. Pada tempat yang dikunjungi telah menyediakan Racun Api untuk antisipasi terjadinya kebakaran agar api tidak membesar. Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam program Manajemen Bencana.

Menurut Komandan Plenton (Danton) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dilatar kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di kota padang dibuatlah POS atau Daerah Layanan POS Kebakaran di setiap wilayah yang ada, sehingga kebakaran tidak meluas di kota padang. Hal ini berdasarkan dari peran pemadam kebakaran dalam pra bencana memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang prosedur evakuasi dan keselamatan, saat bencana peran pemadam kebakaran melakukan evakuasi masyarakat yang terkena bencana ke tempat yang lebih aman dan berkoordinasi

dengan instansi lain untuk memastikan keselamatan dan kesiapan, pasca bencana peran pemadam kebakaran dapat melakukan evaluasi dan analisis untuk memahami penyebab bencana dan meningkatkan kesiapsiagaannya.

Hasil wawancara Komandan Plenton (Danton) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, permasalahan yang di hadapinya mengenai kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana. Maka pada saat ada kebakaran di suatu wilayah sebelum mobil pemadam kebakaran datang untuk menangani permasalahan kebakaran yang terjadi, dilakukan pencegahan agar api tidak lebih membesar oleh jangkauan POS setempat sebelum datangnya mobil pemadam kebakaran. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian mengenai analisis peran pemadam kebakaran dalam manajemen bencana di Kota Padang Tahun 2025

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemadam kebakaran dalam manajemen bencana pada tahap pra, saat, dan pasca kejadian. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang pada Maret–Agustus 2025, dengan pengumpulan data dilakukan pada 26 Juni–3 Juli 2025. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan dalam manajemen bencana, terdiri dari enam orang pejabat dan petugas kunci, yaitu Kabid Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, serta Komandan Pleton. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen yang mencakup SOP, laporan operasional, data kepegawaian, inventaris sarana prasarana, serta dokumen perencanaan dan pendanaan. Proses pengolahan data meliputi transkripsi wawancara, reduksi data, penyajian dalam matriks triangulasi, serta penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui analisis isi dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komponen Input

A. Tenaga Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, tenaga pelaksana yang terlibat dalam manajemen kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mencakup petugas operasional, pengawas, staf pengendali posko, serta unsur pendukung lainnya. Seluruh personel tersebut telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen kebakaran, mencakup tahapan pra, saat, dan pasca kebakaran. Pelatihan ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan pelatihan lintas daerah di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara kualitas, tenaga pelaksana telah dibekali dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi berbagai kondisi darurat dari kebakaran.

Namun demikian, dari sisi kuantitasnya ditemukan bahwa jumlah personel yang tersedia masih belum mencukupi, terutama pada beberapa shift kerja dan wilayah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Ketimpangan dari distribusi ini menjadi tantangan dalam memastikan kecepatan dan efektivitas respon terhadap insiden kebakaran. Kekurangan dari tenaga ini terlihat jelas dalam beberapa kejadian besar, di mana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang harus meminta bantuan dari daerah tetangga seperti Solok, Padang Pariaman, Pariaman, dan Padang Panjang.

Tempat penelitian ini yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, telah menjadi lokasi yang strategis dan relevan untuk menelaah kesiapsiagaan tenaga pelaksana, karena memiliki catatan khusus kebakaran yang cukup tinggi dan kompleks. Salah satu contohnya adalah kebakaran hebat yang terjadi di Pabrik Karet PT Teluk Luas pada tanggal 18 Mei 2025 di kecamatan Lubuk Begalung. Kebakaran ini membutuhkan pengerahan sekitar 10 – 20 unit armada damkar dan lebih dari 150 personel. Ketiadaan hydrant di lokasi memperparah situasi karena mobil damkar harus bolak – balik mengambil air, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pendukung.

Penelitian ini sejalan dengan temuan studi dan laporan sebelumnya. Akbar Kurnia & Faisal Ashar 2022 dalam penelitiannya di daerah Kota Padang tentang Kerentanan Bahaya Kebakaran menyebutkan bahwa sejumlah kecamatan di Kota Padang menunjukkan kerentanan tinggi terhadap bahaya kebakaran karena faktor kepadatannya penduduk dan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Dinas Pemadam Kebakaran merekomendasikan penambahan POS pemadam kebakaran di titik – titik strategis sebagai solusi untuk peningkatan layanan (Akbar Kurnia et al.)

Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, yang menetapkan standar kebutuhan tenaga pemadam kebakaran yaitu 1 personel per 35.000 jiwa penduduk dan keberadaan pos damkar dalam radius 7 km dari wilayah rawan. Dengan jumlah penduduk Kota Padang hampir 1 juta jiwa, kebutuhan personel jauh lebih besar dari kondisi yang ada. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya respon, terutama pada wilayah rawan serta saat menghadapi kebakaran besar yang membutuhkan ratusan personel, seperti kasus kebakaran pabrik karet PT Teluk Luas tahun 2025. Temuan ini sejalan dengan laporan BNPB (2023) dan prinsip Sendai Framework (UNDRR, 2019) yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, meskipun kualitas tenaga pelaksana telah baik, dari sisi jumlah dan distribusinya masih perlu ditingkatkan agar pelayanan pemadam kebakaran di Kota Padang dapat optimal dan merata.

Selanjutnya, laporan Mongabay Indonesia yang mengulas dampak dari kebakaran pabrik karet di Padang, juga menunjukkan bahwa tingginya intensitas dan cakupan kebakaran dapat memerlukan penanganan lintas daerah. Kebakaran tersebut berdampak terhadap kualitas udara, sehingga memaksa pemerintah membuka posko kesehatan darurat dan mengevakuasi warga, yang mencerminkan besarnya tuntutan terhadap kesiapsiagaan tenaga pemadam kebakaran (Mongabay Indonesia, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan laporan penguat dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa meskipun kompetensi tenaga pelaksana di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah terbangun dengan baik, namun dari

sisi kecukupan jumlah tenaga personel dan distribusi di setiap penempatannya masih perlu ditingkatkan. Penting untuk menjamin keterjangkauan layanan dinas pemadam kebakaran diseluruh wilayah Kota Padang yang rawan kebakaran, agar pelayanan kebakaran lebih optimal dan merata.

B. Sarana Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang terdiri atas berbagai perlengkapan utama untuk mendukung operasional dalam penanggulangan kebakaran. Beberapa di antaranya meliputi armada mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), perlengkapan selang, hydrant portabel, alat bantu pernapasan atau Self Contained Breathing Apparatus (SCBA), serta pakaian tahan api dan alat pelindung diri (APD) lainnya. Perlengkapan tersebut menjadi komponen dalam mendukung kesiapsiagaan dan kecepatan respon petugas di lapangan. Namun, meskipun jenis sarana prasarana tersebut tergolong lengkap secara komposisi, masih terdapat sejumlah kendala yang berkaitan dengan kondisi dan jumlah. Beberapa dari armada dan peralatannya telah berusia tua, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Kondisi ini berdampak terhadap efisiensi kerja petugas, terutama dalam menghadapi kebakaran berskala besar atau kebakaran di wilayah medan yang sulit dijangkau.

Narasi ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhlullah Ramadhan tentang Kapabilitas Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Menangani Bencana Kebakaran di Kota Padang. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun kapabilitas personel cukup baik, tetapi masih kekurangan sarana prasarana, khususnya tidak meratanya distribusi pos pemadam kebakaran dan minimnya teknologi pendukung di lapangan (Ramadhan, 2024).

Penelitian ini diperkuat oleh laporan dari Mongabay Indonesia yang menyoroti dampak besar dari kebakaran industri terhadap lingkungan dan kualitas udara di Kota Padang. Kebakaran di pabrik karet tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks kebakaran industri Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sepenuhnya memadai untuk mengantisipasi bencana skala besar (Mongabay Indonesia, 2025). Selain itu, laporan resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengenai Evaluasi Sarana Prasarana dan Kesiapan Operasional turut mengonfirmasi bahwa sebagian besar alat yang digunakan saat ini memerlukan pemeliharaan karena sudah ber usia lama dan mulai tidak efisien. Laporan ini menjadi kendala utama dalam pengadaan armada baru, perawatan alat, serta pengembangan pos damkar di wilayah padat penduduk (Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, 2025).

Disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Padang berpengaruh terhadap kecepatan respon, efektivitas operasional, dan tingkat keberhasilan penanggulangan kebakaran. Meskipun jenis peralatan sudah tergolong lengkap, keterbatasan dalam jumlah, kondisi, dan distribusinya menimbulkan potensi hambatan serius, terutama saat menghadapi kebakaran berskala besar atau di wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa upaya peningkatan kualitas melalui pemeliharaan armada, pemerataan distribusi pos, serta modernisasi teknologi pendukung akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapabilitas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.

C. Dana

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelaksanaan manajemen kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bergantung pada dana yang berasal dari alokasi pemerintahan pusat maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti operasional petugas, pelatihan, serta kebutuhan teknis lainnya. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan dana masih menjadi kendala utama, terutama dalam pengadaan armada tambahan yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Pengajuan dana ke pemerintah pusat sering kali tidak disetujui secara penuh, sehingga tidak semua kebutuhan prioritas dapat di realisasikan.

Tempat penelitian yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, menjadi institusi yang relevan karena secara langsung menangani pembiayaan operasional manajemen kebakaran. Misalnya armada yang digunakan masih banyak yang berusia tua, dan sebagian perlengkapan teknis seperti alat bantu pernapasan belum bisa diperbarui secara menyeluruh akibat keterbatasan anggaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramadhan mengenai kapabilitas dinas pemadam kebakaran dalam menangani bencana kebakaran di Kota Padang, yang menyatakan bahwa dana merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kemampuan dinas dalam mengembangkan pelatihan, teknologi, dan pengadaan peralatan baru. Penelitian ini dapat menekankan pentingnya manajemen anggaran yang lebih strategis dan penambahan alokasi untuk mendukung kapabilitas dinas secara menyeluruh (Ramadhan, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sani & Dara Aisyah, (2025) tentang kinerja badan penanggulangan bencana daerah Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di lahan desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau yang menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana atau keadaan darurat, anggaran merupakan salah satu jenis input yang sangat penting karena tanpa adanya alokasi dana yang memadai, program atau kegiatan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Biaya kesehatan merupakan sejumlah dana yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Biaya kesehatan disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan (Nugroho, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan faktor utama yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan manajemen kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Keterbatasan dana menyebabkan tidak semua kebutuhan prioritas dapat dipenuhi, seperti pengadaan armada baru, pembaruan alat bantu pernapasan, serta sarana teknis lainnya yang sudah berusia tua. Dengan demikian, peningkatan alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapabilitas dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran secara lebih efektif dan efisien.

D. Kebijakan

Hasil wawancara mendalam dengan informan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran di Kota Padang telah mengacu pada kebijakan nasional dan daerah yang jelas serta terstruktur. Salah satunya regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2- 2430 Tahun 2025 tentang perubahan penyelenggaraan pemadam kebakaran di daerah. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan SOP terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, serta sinergi lintas instansi untuk respons kebakaran secara komprehensif Kementerian Dalam Negeri RI. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025.

Penelitian ini dapat menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah mencakup aspek preventif, responsif, dan edukatif. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut teknis pemadaman, tetapi juga menyentuh bidang edukasi masyarakat, penyelamatan korban, hingga penanganan pasca kebakaran. Dukungan kebijakan ini juga tampak dalam program *"Damkar Goes to School"* sebagaimana dilaporkan oleh PPID Kota Padang. Program ini merupakan bentuk kebijakan edukasi kebakaran sejak dini ke sekolah-sekolah di seluruh kecamatan di Kota Padang, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran risiko kebakaran di kalangan generasi muda (PPID Kota Padang, 2025).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani & Alhadi, (2021) tentang efektivitas kinerja dinas pemadam kebakaran kota Padang dalam pencegahan bahaya kebakaran. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dilaksanakan terhadap tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan sesuai standar operasional prosedur (SOP), kebijakan harus mampu menjabatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Winarno, 2008).

Disimpulkan bahwa kebijakan yang mendasari pelaksanaan manajemen kebakaran di Kota Padang tergolong cukup memadai dan komprehensif. Kebijakan telah mencakup aspek peraturan nasional, SOP teknis, koordinasi lintas lembaga, pencegahan, edukasi, dan penanganan darurat. Dukungan kebijakan juga meluas ke masyarakat melalui program edukasi dan tindakan penyelamatan non-kebakaran.

Berdasarkan asumsi peneliti menunjukkan bahwa kebijakan manajemen kebakaran di Kota Padang telah tersusun secara memadai dan komprehensif, mencakup aspek regulasi nasional, SOP teknis, pencegahan, edukasi, serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan darurat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan di lapangan, sehingga diperlukan penguatan dalam pelaksanaan agar dapat berjalan merata di seluruh wilayah.

2. Komponen Proses

A. Pra Bencana

Proses pra bencana merupakan tahap fase krusial dalam manajemen kebakaran, karena sangat berfokus pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan sebelum terjadinya kejadian kebakaran. Di Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif melaksanakan berbagai program dan kegiatan pra bencana yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk BPBD, rumah sakit, sekolah, dan masyarakat umum.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melaksanakan program edukasi kebakaran melalui *"Damkar Goes to School"*, yang menasar pelajar dan tenaga pendidik di berbagai sekolah di Kota Padang, seperti di Kecamatan Padang Timur, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung. Program ini memiliki dua komponen utama, yaitu: penyampaian materi teori mengenai penyebab, potensi, dan cara pencegahan kebakaran dan praktik penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) serta penggunaan alat tradisional seperti karung basah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Bapak Budi Payan, program ini bertujuan untuk dapat membentuk budaya sadar kebakaran sejak dini serta meningkatkan kemampuan individu dalam merespons kebakaran secara tepat.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pelatihan dan simulasi kebakaran dilakukan secara berkala oleh Dinas Pemadam Kebakaran, tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga lintas sektor. Salah satu contohnya adalah simulasi di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, di mana dilakukan pelatihan penggunaan APAR dan prosedur evakuasi bagi seluruh pegawai rumah sakit. Simulasi ini telah menjadi agenda tahunan rumah sakit dan mendapat fasilitasi dari Damkar Kota Padang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi kebakaran di fasilitas pelayanan publik (RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, 2016).

Dinas Pemadam Kebakaran bersama dengan BPBD Kota Padang secara rutin melakukan identifikasi dan pemetaan pada wilayah rawan kebakaran, seperti pada kawasan industri contohnya kebakaran pabrik karet di Lubuk Begalung, kawasan pada permukiman padat, pasar dan bangunan semi permanen. Pemetaan ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Padang 2020–2025, yang menyebutkan pentingnya penyusunan pada peta risiko bencana termasuk kebakaran (BPBD Kota Padang, 2020).

Berdasarkan telaah dokumen BPBD Kota Padang, terdapat program khusus untuk peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan pemadam kebakaran. Dokumen ini juga dapat menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan pemutakhiran data wilayah rawan kebakaran (BPBD Kota Padang, 2020). Penelitian terdahulu sejalan dengan Ramadhan (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kapabilitas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sudah cukup baik dalam pelatihan dan sosialisasi, namun masih perlu peningkatan sarana prasarana dan teknologi pendukung untuk kesiapsiagaan pra bencana yang optimal.

Pelatihan penanggulangan bencana adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk mengurangi dampak bencana dan untuk

mengembangkan kemampuan memberikan pertolongan pertama saat bencana, mendayung perahu (water rescue), pertolongan di ketinggian (vertical rescue), dan evakuasi di hutan (jungle rescue). Selain itu juga membuat jalur distribusi logistik ke wilayah-wilayah terisolasi akibat bencana. Sehingga semua selama tanggap darurat bencana (BNPB, 2019).

Berdasarkan asumsi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pra bencana telah berlangsung secara sistematis dan kolaboratif melalui edukasi, simulasi, pemetaan risiko, serta koordinasi lintas sektor. Namun, untuk menjamin efektivitas jangka panjang, diperlukan pemutakhiran teknologi, pemerataan distribusi sumber daya, serta peningkatan sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi kebakaran berskala besar di masa mendatang.

B. Saat Bencana

Proses saat bencana merupakan fase krusial dalam manajemen kebakaran yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan, mobilisasi armada dan personel, penanganan di lokasi kejadian, evakuasi korban, hingga pelaporan dan koordinasi lintas instansi. Kecepatan dan ketepatan respons menjadi indikator utama dalam keberhasilan pengendalian kebakaran dan penyelamatan jiwa serta aset masyarakat. Hasil penelitian didapatkan, proses penanganan kebakaran dimulai saat laporan masuk melalui nomor darurat 112. Petugas piket akan mencatat informasi lokasi dan skala awalnya kebakaran, selanjutnya melakukan pengiriman unit armada terdekat yang siap beroperasi, dan menyesuaikan jenis armada dengan lokasi (misalnya unit tangki kecil untuk gang sempit). Setibanya di lokasi, Komandan Pleton (Danton) akan memimpin operasi lapangan, yang termasuk dalam menentukan zona aman, melakukan pemetaan titik api, mengatur strategi pemadaman dan evakuasi korban, dan memberi instruksi kepada tim penyerang dan cadangan. Apabila api menyebar secara masif, komandan berwenang meminta bantuan tambahan lintas sektor.

Telah terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk di Jalan Palembang, Lubuk Begalung. Laporan diterima pukul 22.15 WIB dan dalam waktu 7 menit, lima armada Damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut laporan dari Okezone News, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari satu jam berkat adanya respons cepat personel, serta mobilisasi armada dari sektor terdekat, dan adanya dukungan dari masyarakat dalam membuka akses jalan. Tidak ada korban jiwa, namun tiga rumah semi permanen hangus terbakar. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia dan anak-anak ke lokasi aman.

Pemerintah Kota Padang melalui program “Padang Sigap” langsung mengaktifkan koordinasi darurat. Kurang dari 12 jam setelah kejadian, bantuan logistik, tikar, makanan siap saji, dan air bersih disalurkan kepada korban di lokasi pengungsian. Dokumen dari padang.go.id serta menyebutkan bahwa laporan dari BPBD Kota Padang, langsung mendirikan tenda darurat di Kelurahan Parak Gadang Timur, serta menyediakan layanan kesehatan darurat dan psikososial, dan melakukan pendataan korban dan kerusakan property (BPBD Kota Padang, 2025).

Menurut Ramadhan (2024), dalam penelitiannya berjudul “Evaluasi Manajemen Bencana Kebakaran di Kota Padang”, kecepatan mobilisasi armada dan kemampuan teknis petugas sangat menentukan efektivitas pengendalian kebakaran. Namun, adanya hambatan seperti akses jalan sempit dan massa yang berkumpul menjadi kendala klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiri, (2020) tentang pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran pada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa pada tahap saat bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/ peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana.

Peneliti berasumsi bahwa keberhasilan proses penanganan kebakaran sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan respons sejak laporan diterima hingga tahap evakuasi dan koordinasi lintas instansi. Alur yang sistematis mulai dari penerimaan laporan melalui nomor darurat, mobilisasi armada sesuai kondisi lapangan, hingga komando operasi oleh Danton menunjukkan bahwa manajemen kebakaran di Kota Padang telah berjalan dengan pola yang terstruktur. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa efektivitas pengendalian kebakaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan personel, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap SOP, koordinasi komando, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika kebakaran di lapangan.

C. Pasca Bencana

Proses pasca bencana merupakan tahap penting dalam manajemen kebakaran yang fokus pada pemulihan kondisi korban, evaluasi respons, serta perbaikan sistem tanggap darurat. Kegiatan utamanya dalam fase ini mencakup kedalaman pendataan kerusakan, penyaluran bantuan logistik dan sosial, penerbitan ulang dokumen korban, hingga evaluasi kinerja tim pemadam dan lintas sektor. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Pengawasan dan Kasi Operasional Damkar Kota Padang, pasca kejadian dilakukannya evaluasi teknis dan administratif, yang meliputi waktu respons, efektivitas alat pemadam, koordinasinya di lapangan, adanya hambatan operasional (akses, logistik, komunikasi). Rekomendasi hasil evaluasi tersebut digunakan untuk penguatan SOP, pengadaan sarana baru, dan pelatihan petugas secara berkala.

Hasil wawancara mendalam berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, disebutkan bahwa pasca kejadian kebakaran, BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial langsung bergerak cepat mendirikan tenda pengungsian bagi warga terdampak. Selain itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar seperti logistik, air bersih, dan layanan kesehatan terpenuhi. Sebagai bentuk tanggap darurat, kami mendirikan tenda pengungsian agar warga terdampak memiliki tempat berlindung sementara. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan dasar para korban, seperti logistik dari Dinas Sosial, pasokan air bersih, dan layanan Kesehatan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian terdahulu Ramadhan (2024), menyatakan bahwa proses pasca bencana yang meliputi evaluasi dan pemulihan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen kebakaran. Evaluasi kinerja dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pemulihan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiri, (2020) tentang pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran pada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa Pada situasi pasca bencana kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk termasuk lokasi pasar dengan kondisi bangunan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Penelitian ini sesuai dengan buku Waugh, W. L., & Tierney (2007) yang menyatakan bahwa pemadam kebakaran berperan dominan pada fase respon (penyelamatan, pemadaman) dan juga pada fase mitigasi & kesiapsiagaan. Peneliti berasumsi bahwa tahap pasca bencana dalam manajemen kebakaran tidak hanya berfokus pada pemulihan korban dan pendataan kerusakan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem tanggap darurat secara menyeluruh. Evaluasi teknis dan administratif yang dilakukan setelah kejadian diyakini berperan besar dalam peningkatan kualitas respons di masa depan, baik melalui penyempurnaan SOP, pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, maupun penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan rutin. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kebakaran di Kota Padang pada jangka panjang diasumsikan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan evaluasi pasca bencana sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

3. Output

Output dalam manajemen kebakaran merupakan hasil dari rangkaian proses manajemen bencana yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang. Output ini mencakup adanya jumlah kasus kebakaran yang berhasil ditangani, pada saat waktu respons dan efektivitas pemadaman, melalui pelayanan non-kebakaran, Data dan klasifikasi wilayah rawan, serta kualitas pelayanan penyelamatan masyarakat. Output ini juga dapat mencerminkan efektivitas kerja sama lintas sektor, kesiapan SDM, serta ketersediaan sarana prasarana.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menangani kebakaran dan penyelamatan sepanjang tahun 2025. Beberapa output yang tercatat antara lain, yaitu adanya penanganan kebakaran skala kecil contohnya pada kebakaran lahan di Piai Tengah pada 3 Juni 2025. Damkar berhasil memadamkan api dalam waktu ± 30 menit sehingga tidak merambat ke pemukiman. Pelayanan Penyelamatan Non-Kebakaran contohnya membuka pintu mobil terkunci tanpa merusak kendaraan dalam waktu ± 15 menit.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu Ramadhan (2024), menegaskan bahwa output manajemen kebakaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan sarana prasarana, serta koordinasi yang baik antar instansi untuk memastikan respons cepat dan efektif. Penelitian ini sesuai dengan buku United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2015) tentang peran institusi respon (termasuk Damkar) berkontribusi terhadap ketahanan komunitas dan pemulihan pasca-bencana berguna bila ingin menilai outcome jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dari laporan lapangan Damkar Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa output manajemen kebakaran di Kota Padang tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang baik dan terukur, yaitu melalui adanya respons cepat dalam berbagai kejadian kebakaran dan penyelamatan, dapat melakukan kemampuan yang menangani kebakaran skala besar dan kecil tanpa korban jiwa, adanya pelayanan penyelamatan tambahan di luar kebakaran, seperti penyelamatan non-konvensional, sehingga tersedianya data klasifikasi daerah rawan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, laporan internal, serta wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa output manajemen kebakaran di Kota Padang tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang optimal dan terukur. Hal ini ditunjukkan melalui respons cepat dalam penanganan kebakaran maupun penyelamatan non-kebakaran, keberhasilan menekan angka korban jiwa, serta kemampuan menjaga tingkat kerusakan pada level minimal.

Peneliti berasumsi bahwa output manajemen kebakaran yang dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mencerminkan efektivitas kinerja organisasi dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana kebakaran maupun pelayanan penyelamatan non-kebakaran. Keberhasilan penanganan kasus kebakaran dalam waktu relatif singkat serta kemampuan memberikan layanan penyelamatan masyarakat menunjukkan adanya kesiapan SDM, kecukupan sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor yang berjalan baik. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kualitas output Damkar sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons, efektivitas operasional, dan diversifikasi layanan yang diberikan kepada masyarakat

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Komponen Input

- Tenaga Pelaksana terdiri atas petugas operasional, pengawas, staf pengendali posko, serta unsur pendukung lainnya yang telah memperoleh pelatihan dan sosialisasi terkait SOP manajemen kebakaran baik pada tingkat internal, provinsi, maupun nasional. Pelatihan ini dinilai telah meningkatkan kompetensi serta kesiapsiagaan petugas dalam merespons kejadian kebakaran. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan personel pada beberapa shift dan wilayah tertentu yang menyebabkan belum optimalnya penanganan kebakaran secara menyeluruh.
- Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah memiliki sarana utama seperti armada mobil pemadam, alat pemadam api ringan (APAR), selang pemadam, hydrant portable, SCBA, serta perlengkapan APD lainnya. Namun, sebagian armada dan alat telah mengalami penurunan fungsi akibat usia pemakaian yang cukup lama. Permasalahan lain adalah terbatasnya pos pemadam di sejumlah titik strategis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi penunjang pemadaman.
- Dana operasional Damkar bersumber dari APBD maupun dukungan dari pemerintah pusat dan diarahkan untuk keperluan operasional, pelatihan, pengadaan sarana, dan pengembangan teknologi. Namun, anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mencakup kebutuhan ideal, terutama untuk pengadaan armada tambahan yang membutuhkan pembiayaan besar. Pemerintah dan DPRD Kota Padang melalui APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,98 triliun telah mengalokasikan sebagian dana untuk penguatan sektor ketangguhan bencana, termasuk pemadam kebakaran.
- Kebijakan manajemen kebakaran merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 tahun 2025 dan regulasi daerah yang mengatur tata kelola kebakaran secara formal dan sistematis. Pemerintah Kota Padang

melalui BPBD dan Damkar telah mengembangkan SOP terintegrasi yang menekankan pada respons cepat, koordinasi lintas instansi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk satgas khusus yang bertugas melakukan inspeksi instalasi listrik dan memastikan ketersediaan APAR di fasilitas umum, seperti pasar tradisional. Peran Damkar juga diperluas mencakup pelayanan penyelamatan dan bantuan darurat, termasuk evakuasi dan penyediaan posko pengungsian.

2. Komponen Proses

- a. Proses pra bencana di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah melaksanakan berbagai kegiatan preventif secara berkala, seperti pelatihan internal, edukasi publik, serta identifikasi wilayah rawan kebakaran. Program unggulan seperti *"Damkar Goes to School"* terbukti meningkatkan literasi kebakaran di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, pelaksanaan simulasi kebakaran bersama instansi lintas sektor, termasuk rumah sakit dan BPBD, memperkuat kesiapsiagaan sumber daya manusia dan kesiapan fasilitas penunjang. Meskipun demikian, peningkatan terhadap sarana, prasarana, dan teknologi pendukung masih sangat dibutuhkan agar mitigasi risiko kebakaran dapat berjalan lebih optimal.
- b. Pada fase saat bencana, respons cepat antar koordinasi lintas sektor, dan mobilisasi armada menjadi komponen kunci dalam penanganan insiden kebakaran. Prosedur tanggap darurat dilakukan segera setelah laporan kejadian diterima, namun terdapat hambatan teknis seperti akses jalan sempit, kemacetan, dan konsentrasi massa di lokasi kejadian. Penetapan zona aman dan evakuasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan jiwa. Program *"Padang Sigap"* menjadi instrumen percepatan respons, dan telah menunjukkan efektivitasnya dalam penanganan kebakaran selama tahun 2025.
- c. Proses pasca bencana dilakukan melalui pendirian tenda pengungsian, penyaluran logistik darurat, serta pendataan korban dan kerusakan secara sistematis. Proses ini melibatkan koordinasi yang kuat antara BPBD, Dinas Sosial, Damkar, dan aparat kewilayahan. Meskipun demikian, peningkatan dalam hal kapasitas logistik dan efektivitas koordinasi lintas sektor masih diperlukan agar proses pemulihan pasca kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

3. Komponen Output

Output pelaksanaan manajemen kebakaran di Kota Padang tahun 2025 menunjukkan peningkatan efektivitas, respons cepat, dan perluasan jangkauan layanan. Hal ini tercermin dari keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi berbagai jenis kebakaran, termasuk pemadaman lahan yang terkendali dalam waktu singkat serta penanganan kebakaran besar di kawasan industri melalui koordinasi lintas unit. Meskipun jumlah kejadian meningkat, rendahnya angka korban jiwa dan minimnya kerusakan menunjukkan efektivitas kinerja. Selain itu, keberadaan data klasifikasi wilayah rawan kebakaran menjadi landasan penting dalam perencanaan strategis, penentuan prioritas layanan, penambahan pos pemadam, dan penguatan edukasi masyarakat di wilayah berisiko tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para informan, yaitu Kabid Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, serta Komandan Pleton, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga demi kelancaran penelitian ini.

Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan manajemen kebakaran di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kyberman: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 28–40. <https://doi.org/10.35326/kyberman.v3i2.843>
- Agustino, L. (2022). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Ahayalimuddin, S. (2020). Mitigasi bencana di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Manajemen Bencana*, 2(1), 12–21.
- Anggun, A., Pratama, D., & Sari, R. (2020). Manajemen risiko bencana: Pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jakarta: Penerbit Mitra Ilmu.
- Azwar A. (2018). Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi 3. Jakarta: Binarupa. Azwar, S. (2018). Metode penelitian (Edisi revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Panduan mitigasi kebakaran dan manajemen dampaknya. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kota Padang (2020) - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Padang 2020–2025.
- BNPB. (2020). Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024. Jakarta. Diakses dari : Carter, W. N. (2019). Disaster Management Hand Book Research Design Edisi 4.
- BNPB. (2019). Rencana Strategis BNPB Tahun 2015-2019. Jakarta. Diakses dari : www.bnpb.go.id, 1 Desember 2022
- BPBD Kota Padang (2025) - Laporan pendirian tenda darurat dan layanan kesehatan darurat.
- CFE-DM. (2019). Disaster Management Reference Handbook: Indonesia. Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). (2007). Pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- DPRD Kota Padang (2025) - Terkait Nota keuangan dan RANPERDA perubahan APBD Kota Padang.
- Dinas Pemadam Kebakaran. (2024). Prosedur Penanganan Kebakaran: Tahapan Pasca Bencana. Padang: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang (2025) - Laporan resmi tentang Evaluasi Sarana Prasarana dan Kesiapan Operasional.
- Ginting, A. H., & Dewi, T. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara dalam mewujudkan desa tangguh bencana (Studi pada Desa Loa Ipuh dan Desa Purwajawa Kabupaten Kutai Kertanegara)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. Nomor 75 Tahun 2019 Penanggulangan Krisis Kesehatan . (2019). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2020). Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK). Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang perubahan penyelenggaraan pemadam kebakaran di daerah.
- Khambali, I. (2019). Manajemen Penanggulangan Bencana. Yogyakarta: CV. Khan, A. (2019) . Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach. Mandaluyong City, Phil.: Asian Development Bank.
- Marina, M., Yuliana, Y., & Sari, D. P. (2021). Penguatan peran dinas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana kebakaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–53.
- Mulyadi. (2019). Perilaku organisasi dan implementasi kebijakan publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2019). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Edisi 3. Bandung: Alfabeta.
- National Fire Protection Association. (2023). Fire causes and risks.
- Nugroho, Riant (2008). Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta : Media Elex Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. (2022). Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapanuli Tengah: Tugas dan Fungsi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. [https://\[alamat-url-resmi\]](https://[alamat-url-resmi]).
- PPID Kota Padang (2025) - Laporan program “Damkar Goes to School”.
- Pemerintah Kota Padang (2025) - Laporan program “Padang Sigap” dan penyaluran bantuan.
- Rakuasa, D., Fitriani, L., & Nugroho, T. (2022). Pengantar manajemen bencana. Yogyakarta: Deepublish.
- RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (2016) - Laporan simulasi kebakaran tahunan. Rahmadhani, S., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam
- Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(September), 261–268.
- Ramadhan, Fadhlullah (2024). Kapabilitas Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Menangani Bencana Kebakaran di Kota Padang. (Disebutkan beberapa kali).
- Sani, M., & Dara Aisyah. (2025). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 19–31.
- UU RI No. 24 (2007). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Sekretariat Negara. Jakarta. www.bnpb.go.id, 1 Desember 2022.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. United Nations.
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, PT. Buku Kita, Jakarta, 2008 Waugh, W. L., & Tierney, K. (Eds.). (2007). *Emergency management: Principles and practice for local government* (2nd ed.). ICMA.